

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jalan Salah satu bagian dari infrastruktur yang merupakan bagian sangat penting diberbagai pemabangunan skala nasional dan daerah (Herdiani, 2018). Di Indonesia dalam pembangunan daerah terdapat tiga hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah tersebut yaitu merupakan listrik, Air, serta Jalan (Sriwati et al., 2024). Maka dengan demikian pemerintah pusat wajib memberikan perhatian kepada daerahnya di berbagai infrastrukturnya yang bertujuan untuk menunjang pada kemajuan suatu wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi kunci utama dalam pembangunan pada ekonomi masyarakat yaitu dimana tersediannya sarana umum yang baik, dimana yang merupakan sarana umum itu adalah meliputi jalan penghubung dalam kota, antar kabupaten, serta jembatan listrik dan kepentingan publik lainnya.

Perkotaan merupakan menjadi bagian yang dimana menduduki tempat serta posisi yang menjadi lebih strategis, dimana hal ini menjadi bagian yang tidak terlepas terhadap kenyataan-kenyataan yang dimana bahwa perkotaan merupakan lokasi yang akan menjadi paling efisien serta efektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang sehubungan dengan ketersediaan pada sarana serta prasarannya. Dan dengan melalui pengelolaan perkotaan, kota akan berupaya dalam mengoptimalkan efisiensinya dengan secara yang aktif dengan melakukan membuat peluang dalam mempebesar pada manfaat dari input serta

outputnya terhadap penghuni kota tersendiri ataupun wilayah pada sekitarnya yang dimana memiliki keterkaitan dengan kota tersebut. Sehingga yang dimana ditetapkan menjadi orientasi dalam Pembangunan kearah pada pengelolaan perkotaan yang dimana terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengoperasian, serta dalam pengendalian. Pembangunan perkotaan. indicator yang menjadi komponen dalam prasarana dan sarana perkotaan yang sangar erat dalam keterkaitan serta fungsi dan peran pokok kota, yang menjadi komponen dalam prasarana dan saran peerkotaan yang ada didalam kelompok infarstruktur kota adalah salah satunya yaitu jalan kota (Fitriani, 2019).

Kondisi jalan di Indonesia pada saat ini selalu menjadi permasalahan publik dimana jalan di Indonesia masih bayak kekurangan sehingga banyak pengaduan public mengenai jalan di setiap berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia dimana telah mengeluarkan yaitu Undang – Undang Republik yang dimana didalamnya membahas mengenai jalan yaitu terdapat di UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Adapun isi di dalam UU no 38 tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang dimana meliputi di berbagai bagian jalan yang dimana dimaksud untuk sebagai pelengkap dan perlengkapannya yang di berikan untuk lalu lintas, yang keberadaanya ada di permukaan tanah, dan diatas permukaan tanah, kecuali yaitu jalan kereta api dan jalan lori. Ada pun peran jalan dalam Pasal ini menyebutkan yaitu;

1. Jalan sebagai landasan komponen dalam peran penting pada bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik daan dalam pertahanan serta keamanan, dan juga untuk kemakmuran pada rakyat.

2. Jalan juga landasan pada sebuah prasarana dibidang distribusi barang serta jasa yang dimana menjadi inti penting pada kehidupan masyarakat, bangsa serta negara.
3. Jalan adalah landasan dalam satu kesatuan pada sistem jaringan yang menghubungkan serta mengikat pada seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 mengenai jalan dimana disebutkan bahwasannya mengenai pemeliharaan jalan yang terdapat pada pasal 1 ayat 8, dan juga terdapat wewenang pemerintah yang tercantum didalam pasal 59 ayat 1. Terdapat berbagai pengajian dan pengembangan dalam bidang jalan yang mencakup aspek perencanaan, program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan juga pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, serta tata laksana dan pengawasan serta pengendalian tercantum pada pasal yang ke 83 dan pasa; 84 ayat 3.

Tabel.1 1 Panjang jalan di Kota Batam menurut tingkat kewenangan Pemerintahan 2021-2023.

Tingkat Kewenangan	Sataun	2021	2022	2023
Negara	Km	160.20	0	0
Provinsi	Km	112.35	112.35	0
Kabupaten/ Kota	Km	646.16	646.16	917.20
Jumlah	Km	918.17	758.51	917.20

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Penjelasan dari table diatas yaitu menjelaskan bahwa Panjang jalan di kota Batam yang dimana menjadi tingkat kewenangannya pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 yaitu dengan Panjang 917.20 km. awal tahun 2023 jalan provinsi dilakukan adanya pengalihan jalan kepada pemerintahan Kota Batam ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Namun fakta yang terjadi dilapangan di Jalanan Kota Batam yang merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau banyak masyarakat Kota Batam memberikan pengaduan publiknya kepada pemerintah yaitu: Dengan melalui batam pos mengenai kerusakan jalan Kota yang parah di Kota Batam yang ada di terdapat beberapa pengaduan masyarakat di berbagai media sosial Kota Batam mengenai kerusakan jalan yang ada di Kota Batam sumber dari Tribun Batam Jalan rusak di Batam warga mengeluh , jalan selasih rusak hingga bergelombang dimana pengaduan ini terdapat di tribunnews Batam. Keluhan Masyarakat melalui Tribun Batam yaitu Bak Gelombang laut, jalan disimpang kuda Batam Potensi bahayakan kendaran akibat jalan bergelombang dimana terdapat sejumlah titik jalan berlubang dari simpang kuda sampai kebengkong terdapat jalan rusak dan berlubang yang terdapat di media masa yaitu Trubunews Batam. Selanjutnya kerusakan jalan yang cukup di jalan Laksamana Bintan di depan Kawasan industry Kawasan Industri Hijrah Batam Center, kerusakan jalan tersebut cukup parah sehingga menyebabkan kendaraan kesulitan saat melintas dan hampir semua ruas jalan berlubang dan rusak dimana pengaduan ini terdapat di Batampos.

Maka dengan demikian pemeliharaan jalan adalah implementasi kebijakan yang dimana telah tercantum dalam Dalam UU RI Nomor 38 Tahun 2004 pasal 30

ayat 1 poin b yaitu penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dan ditetapkan UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yaitu mengenai kebijakan dalam pemeliharaan jalan itu sendiri yang terletak pada pasal 30 ayat 1 poin b dimana berisikan yaitu dimana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan jalan maka wajib yaitu dalam memrioritaskan pemeliharaan, perawatan serta pada pemeriksaan terhadap jalan dengan secara berkala yang dimana untuk dalam mempertahankan pada tingkat pelayanan jalan yang dimana sesuai dengan pada standar pelayanan.

Tabel.1 2 Panjang jalan Kota dengan kondisi baik, terpelihara, dan rusak di Kota Batam 2021-2023.

Indikator	2021	2022	2023
Panjang jalan dengan kondisi baik	565,36 Km	570.19 Km	733.91 Km
Panjang Jalan yang terpelihara	30 Km	16.35 Km	47.74 Km
Panjang Jalan dengan kondisi rusak	80,80 Km	75.97 Km	50.79 Km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Adapun penjelasan dari tabel diatas, yaitu menjelaskan bahwasannya kondisi dan Panjang jalan di Kota di Kota Batam pada tahun 2023 yaitu 917.20 km. adapun kondisi jalan di kota Batam pada tahun 2023 yaitu: Panjang jalan kondisi baik terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan

kondisi rusak 50.79 km. terdapat 733.91 km, dan Panjang jalan terpelihara 47.74 km, dan Panjang jalan kondisi rusak 50.79 km.

Maka dengan demikian dari penjelasan pada table diatas megatakan bahwasanya masih ada jalan Kota dengan kondisi jalan rusak yaitu 50.79 km, dan dengan hal ini menjadi salah permasalahan yang dimana jalan rusak kota di Kota Batam, dan jalan rusak tersebut harus di perbaiki dan dipelihara.

Tabel.1 3 Panjang Jalan dengan Kondisi di Kota Batam 2023

Inidikator	Satuan	2023
Panjang Jalan dengan kondisi berat	Km	51.72
Panjang jalan kondisi sedang	Km	80.78
Panjang jalan jenis permukaan aspal	Km	739.99
Panjang jalan jenis permukaan kerikil	Km	9.19
Panjang jalan jenis permukaan tanah	Km	42.45
Total		924.13 Km

(Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)

Penjelasan dari table diata yaitu meyakini bahwasannya jalan di Kota Batam pada tahun 2023 masih terdapat Panjang jalan dengan kondisi berat yaitu 51.72 km dan dengan Panjang jalan dengan kondisi sedang 80.78 km kemudian Panjang jalan

dengan jenis permukaan aspal 739.99 km atau dan sedangkan panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil 9.19 km dan yang terakhir panjang jalan dengan jenis permukaan tanah yaitu 42.45 km.

Adapun penjelasan dari table diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya jalan kota di Kota Batam masih terdapat kondisi jalan yang belum dengan kondisi rusak berat dan jalan dengan kondisi sedang, serta jalan dengan permukaan jalan kerikil dan juga jalan dalam jenis permukaan dengan jenis tanah yaitu dengan total panjang jalan 184, 14 Km, dan yang dimana jalan tersebut harus diperbaiki dan dipelihara oleh pemerintah Kota Batam.

Maka dengan demikian berdasarkan pada penjelasan diatas tersebut maka dapat diketahui bahwasannya peran besar pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan jalan serta khususnya pada Dinas Bina Marga Kota Batam pada pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan perbaikan jalan dengan memantau dengan terus bagaimana perkembangan jalan serta perbaikan pada keberadaan jalan rusak Kota di Kota Batam tersebut di akhir tahun ini masih banyak jalan rusak dimana fakta dengan adanya pengaduan publik di media massa. yang dimana pemerintah Kota Batam harus segera melakukan kebijakan, supaya tidak terjadi lagi peningkatan dalam kecelakaan akibat jalan rusak yang ada di Kota Batam. Kerusakan jalan perlu dijaga sesegera mungkin agar jalan tersebut dapat terus memberikan manfaat yang telah diantisipasi sebelumnya. Pemeliharaan jalan adalah pemantauan pemeliharaan rutin dan perbaikan yang diperlukan dan direncanakan untuk menjaga jalan dalam kondisi yang baik dan terus menunjukkan kinerja terbaiknya selama umur jalan yang telah ditentukan sebelumnya yang

dimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang telah ditentukan pada Peraturan daerah yaitu UU No 32 Tahun 2022 yang tertera dalam paragraph 2 pasal 10 tentang sub koordinator urusan jalan dimana bagian mengatakan melaksanakan penyelenggaraan sistem jaringan jalan dan penyelenggaraan penanganan jalan. yang dimana melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pengendalian dari kelompok substansi. Dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana. Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam. dan kemudian dapat memberikan pembelajaran yaitu dalam studi evaluasi kebijakan publik yang dimana telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, dan daerah ataupun terhadap lembaga lainnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang ada maka adapun identifikasi masalah diatas yaitu:

1. Masih banyak kondisi jalan kota yang rusak sejak 2021-2023 saat ini menjadi rata- rata 6,9%
2. Akibat dari kerusakan jalan tersebut membuat masyarakat kesulitan saat melintas, dan megabikatkan kecelakaan pada masyarakat,
3. Panjang jalan kota di Kota Batam yaitu 917.20 km sebagian dari itu masih terdapat kerusakan jalan yang tidak terpeliharaan dengan baik yaitu 184.14 Km.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Kota Batam?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam?

1.5 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Batam
2. Untuk menganalisis Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan yang sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Negara yaitu kebijakan publik, administrasi pembangunan, pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tersebut Sebagai Materi dan berserta saran maupun penelitian pada praktik di lapangan, dari Dinas dalam penentuan rencana Evaluasi Pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam.